



SUBSTANSI

SUMBER ARTIKEL AKUNTANSI AUDITING DAN KEUANGAN

Substansi

ISSN: 2598-0106 (print)
ISSN: 2620-9853 (online)

Artikel 1

Volume 9, Number 2,
Year 2025

19-12-2025

Akuntansi Dialogis dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan untuk Ekonomi Biru Berkelanjutan

Fety Widiанти Aptasari

Universitas Mataram, Indonesia

Muhammad Helmi Falah

Politeknik Perikanan Negeri Tual, Indonesia

Fera Firyal Thahir

Politeknik Perikanan Negeri Tual, Indonesia

Baiq Krisnina Maharani Putri

Universitas Mataram, Indonesia

**Penulis Koresponden: fetyaptasari@staff.unram.ac.id*

Dimasukkan:
29-04-2025

Direvisi:
4-11-2025

Diterima:
14-11-2025

Sitasi:

Fety Widiанти Aptasari. (2025). Akuntansi Dialogis dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan untuk Ekonomi Biru Berkelanjutan. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 9(2). <https://doi.org/10.35837/subs.v9i2.3299>

<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/SUBS/article/view/3299/version/3022>



Artikel ini diterbitkan secara gratis dan terbuka oleh Program Diploma III Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN. Naskah ini telah diterima untuk dimasukkan ke dalam Jurnal Substansi: Sumber Akuntansi, Auditing, dan Keuangan oleh Tim Editor resmi jurnal.

Akuntansi Dialogis dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan untuk Ekonomi Biru Berkelanjutan

Fety Widiанти Aptasari

Universitas Mataram, Indonesia

Muhammad Helmi Falah

Politeknik Perikanan Negeri Tual, Indonesia

Fera Firyal Thahir

Politeknik Perikanan Negeri Tual, Indonesia

Baiq Krisnina Maharani Putri

Universitas Mataram, Indonesia

**Penulis Koresponden: fetyaptasari@staff.unram.ac.id*

Abstrak :

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi akuntansi dialogis sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia.

Metode: Data dikumpulkan melalui studi literatur dari jurnal, laporan, dan kebijakan terkait pengelolaan perikanan dan akuntansi keberlanjutan. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis sintesis tematik terhadap tantangan dan peluang penerapan akuntansi dialogis.

Temuan penelitian: Penelitian menemukan bahwa ketimpangan akses informasi, dominasi kebijakan *top-down*, dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan utama penerapan akuntansi dialogis, namun teknologi informasi membuka peluang transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan.

Implikasi praktis: Hasil penelitian mendorong integrasi akuntansi dialogis untuk mewujudkan tata kelola sumber daya laut yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata kunci : Akuntansi; Transparansi; Pesisir; Keberlanjutan; Partisipasi.

Abstract :

Research objective: This study aims to explore dialogic accounting as a solution to enhance transparency, accountability, and sustainability in the management of coastal resources in Indonesia.

Method: Data were collected through a literature review of journals, reports, and policies related to fisheries management and sustainability accounting. Data analysis was conducted using a qualitative approach based on thematic synthesis of the challenges and opportunities in implementing dialogic accounting.

Research findings: The study found that information access inequality, top-down policy dominance, and resistance to change are major barriers to the implementation of dialogic accounting; however, information technology opens opportunities for transparency and stakeholder participation.

Practical implication: The findings encourage the integration of dialogic accounting to achieve fairer, more participatory, and sustainable coastal resource governance.

Keywords : Accounting; Transparency; Coastal; Sustainability; Participation.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi ekonomi besar dari sektor kelautan, mencapai US\$1,3 triliun per tahun (Pebrianto, 2020). Namun, kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional masih sangat rendah, hanya 2,65% pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Di sisi lain, masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi,

dengan 20–48% nelayan hidup di bawah garis kemiskinan (Pryanka, 2018). Kondisi ini mencerminkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan, yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem pesisir. Selain rendahnya kontribusi perikanan terhadap PDB dan rendahnya tingkat kesejahteraan komunitas pesisir, pengelolaan perikanan di Indonesia juga menghadapi tantangan besar berupa tingginya tingkat eksploitasi sumber daya ikan yang mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Sebagian besar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) telah menunjukkan tanda-tanda *overfishing* atau tangkapan berlebih akibat kurangnya pengelolaan yang terukur. Selain itu, persoalan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF) menjadi ancaman besar yang merugikan potensi penerimaan negara sekaligus ekosistem laut.

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya kelautan secara terukur. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk membatasi eksploitasi sumber daya alam, memaksimalkan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan, serta mendorong pemerataan ekonomi di kawasan pesisir. Namun, implementasi kebijakan ini kerap menuai kritik, terutama terkait pembatasan kuota dan akses yang dinilai lebih menguntungkan pelaku usaha besar dibanding masyarakat kecil (Falah & Aptasari, 2023). Hal ini menyoroti pentingnya tata kelola sumber daya kelautan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan ekologi.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan, konsep akuntansi dialogis menjadi relevan sebagai pendekatan alternatif untuk memperbaiki mekanisme akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik. Secara teoretis, akuntansi dialogis berakar pada pemikiran kritis dalam disiplin akuntansi yang dikembangkan oleh (Brown & Dillard, 2014), yang menekankan pentingnya proses komunikasi partisipatif dalam penyusunan dan implementasi kebijakan. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang bersifat teknokratis dan sering kali elitis, akuntansi dialogis mengedepankan prinsip deliberasi publik, di mana semua pemangku kepentingan—termasuk komunitas lokal yang terdampak langsung—dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan kerangka *accountability as dialogic process* yang dikemukakan oleh Gray (1992), yang menempatkan akuntabilitas sebagai proses sosial yang terbuka terhadap kritik dan perbedaan pandangan.

Ketimpangan informasi juga menjadi hambatan besar. Pelaku usaha besar memiliki akses lebih baik terhadap kebijakan dibanding masyarakat pesisir yang sering kali kurang memahami implikasi regulasi. Di sinilah akuntansi dialogis berperan, dengan menekankan komunikasi dan keterlibatan aktif semua pihak. Berbeda dari akuntansi tradisional yang berfokus pada laporan finansial, pendekatan ini menciptakan ruang diskusi yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan (Brown & Dillard, 2014). Akuntansi dialogis dalam kebijakan publik mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dengan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan, misalnya, akuntansi dialogis membantu menyelesaikan konflik kepentingan antara nelayan kecil, industri, pemerintah, dan kelompok lingkungan melalui dialog berbasis data. Pendekatan ini juga mengatasi tantangan seperti ketimpangan akses informasi, konflik kepentingan, dan keberlanjutan ekologis serta sosial dengan mengintegrasikan semua dimensi tersebut dalam pengambilan keputusan, menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Pendekatan akuntansi dialogis menekankan pentingnya dialog antara negara, masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah (LSM), dan komunitas lokal, yang semuanya memiliki peran penting dalam menciptakan sistem sosial yang adil dan berkelanjutan.

(Bebbington et al., 2007). Di Indonesia, pluralitas sosial dan budaya menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional, sehingga akuntansi dialogis menawarkan cara yang lebih adil untuk mengakomodasi suara dari berbagai kelompok, termasuk masyarakat pesisir yang sering kali terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan. Akuntansi dialogis berupaya mengatasi dominasi informasi yang hanya menguntungkan pihak tertentu, seperti investor besar atau pemerintah, dengan menciptakan model yang lebih pluralistik dan inklusif. Melalui keterlibatan berbagai pihak, pendekatan ini memungkinkan masyarakat pesisir untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri. Hal ini menjadi sangat penting dalam mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang membuat wilayah pesisir Indonesia rentan terhadap kenaikan permukaan air laut dan bencana lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1) menganalisis tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat; (2) mengeksplorasi relevansi dan penerapan akuntansi dialogis dalam mendorong tata kelola sumber daya kelautan yang adil dan berkelanjutan; serta (3) mengidentifikasi strategi untuk memperkuat praktik akuntansi dialogis dalam kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji peran akuntansi dialogis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi akuntansi kritis, khususnya dalam konteks akuntansi keberlanjutan dan tata kelola sumber daya alam. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perikanan yang lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan.

Penelitian ini mengkaji tantangan dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia, yang diwarnai oleh eksploitasi berlebihan, ketimpangan sosial-ekonomi, dan minimnya partisipasi masyarakat lokal. Studi ini menyoroti pentingnya akuntansi dialogis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi ketimpangan akses informasi antara pelaku usaha besar dan masyarakat pesisir, dominasi pendekatan *top-down* dalam perumusan kebijakan, perbedaan perspektif antarkelompok yang sering kali menyebabkan konflik kepentingan, keterbatasan sistem akuntansi tradisional dalam menangkap dimensi sosial-ekologis, serta resistensi terhadap perubahan menuju sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan peluang untuk memperkuat penerapan akuntansi dialogis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penciptaan ruang dialog yang lebih setara. Pendekatan ini dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara retorika keberlanjutan dan praktik nyata dalam pengelolaan sumber daya pesisir, dengan mendorong integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara lebih seimbang. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia, khususnya dalam konteks ekosistem yang rentan terhadap perubahan sosial dan lingkungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Dialogis

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan akuntansi dialogis, yang mengedepankan partisipasi dan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan

sumber daya alam (Brown & Dillard, 2014). Teori ini mengkritik pendekatan akuntansi tradisional yang lebih fokus pada laporan finansial semata, dan lebih menekankan pentingnya proses komunikasi yang terbuka dan transparan antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Akuntansi dialogis bertujuan menciptakan ruang bagi dialog yang setara, yang dapat mengakomodasi berbagai perspektif dan kepentingan dari semua pihak, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang kompleks dan rentan terhadap konflik kepentingan (Bebbington et al., 2007).

Teori lain yang relevan dalam konteks ini adalah teori keberlanjutan sosial-ekonomi yang berfokus pada pencapaian keseimbangan antara keuntungan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemerataan sosial. Pendekatan ini penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pengelolaan perikanan dan ekosistem pesisir di Indonesia yang memiliki tantangan besar dalam hal eksploitasi berlebihan dan ketimpangan sosial-ekonomi (Hörisch et al., 2014). Konsep keberlanjutan ini juga menekankan pentingnya pengintegrasian dimensi sosial dan ekologis dalam setiap kebijakan yang diterapkan, dengan tujuan agar kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Dmytriiev et al., 2021; Lüdeke-Freund et al., 2017).

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan sumber daya kelautan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan akuntansi dialogis sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia memiliki tantangan besar, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan, serta ketidakadilan distribusi manfaat dari sektor perikanan (Falah & Aptasari, 2023). Dalam hal ini, akuntansi dialogis berfungsi sebagai alat mediasi yang dapat membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan—termasuk pemerintah, industri, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan—untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini juga mengatasi ketimpangan informasi yang sering terjadi antara pelaku usaha besar dan masyarakat pesisir, serta memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri.

Teori Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel dan responsif. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, termasuk sumber daya kelautan untuk ekonomi biru berkelanjutan, keterlibatan warga menjadi elemen strategis untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Akuntabilitas sosial semakin diakui sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan layanan publik (Brinkerhoff & Wetterberg, 2016; Schaaf et al., 2017).

Di tingkat lokal, akuntabilitas sosial mendorong komunikasi dua arah, menciptakan saling pengertian antara masyarakat dan pemerintah, serta memperkuat pemberdayaan warga. Hal ini menghasilkan peningkatan kepercayaan dan efektivitas koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Khodary, 2022). Beberapa studi menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas sosial terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di tingkat lokal (Yilmaz et al., 2008).

Namun, meskipun potensi positifnya telah banyak dibuktikan, dinamika pelaksanaan akuntabilitas sosial juga menunjukkan berbagai tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat seringkali hanya bersifat simbolik (tokenistik) dan tidak memiliki

pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan (Vuković & Babović, 2018). Hal ini terjadi ketika warga hanya diberi ruang untuk didengar tanpa diikuti oleh kewajiban pemerintah untuk merespons atau mengakomodasi masukan tersebut. Dalam beberapa kasus, partisipasi justru digunakan sebagai strategi untuk memperkuat relasi klientelistik antara pejabat dan kelompok masyarakat tertentu.

Masiya et al. (2019) menegaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna adalah resistensi dari para pejabat publik untuk berbagi kewenangan. Pejabat kerap memandang proses pengambilan keputusan sebagai domain eksklusif mereka, menganggap bahwa mereka memiliki kapasitas lebih baik untuk menentukan solusi terbaik bagi masyarakat. Akibatnya, implementasi akuntabilitas sosial seringkali berhenti pada tataran formalitas prosedural tanpa substansi pengaruh terhadap keputusan nyata.

Guna memahami lebih jauh tentang kualitas partisipasi masyarakat dalam mekanisme akuntabilitas sosial, banyak penelitian mengadopsi kerangka teoritis Tangga Partisipasi yang dikembangkan oleh Arnstein (1969). Model ini mengkategorikan partisipasi menjadi delapan tingkatan yang terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: non-partisipasi, tokenisme, dan kekuatan warga negara. Tingkatan partisipasi paling rendah mencerminkan manipulasi atau terapi semu, sedangkan tingkatan tertinggi menggambarkan partisipasi penuh di mana warga memiliki kekuasaan nyata dalam menentukan kebijakan publik (Arnstein, 1969; Botchwey et al., 2019).

Pada kategori non-partisipasi, partisipasi yang ditawarkan bersifat manipulatif dengan tujuan mendidik atau membentuk opini masyarakat sesuai dengan agenda pemerintah. Sementara itu, kategori tokenisme meliputi pemberian informasi sepihak kepada masyarakat tanpa adanya jaminan bahwa suara mereka akan memengaruhi hasil kebijakan. Bahkan ketika masyarakat dikonsultasikan melalui forum atau survei, mekanisme ini seringkali hanya berfungsi sebagai formalitas administratif (Nomdo et al., 2019). Kategori terakhir, kekuatan warga negara, menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam proses perencanaan, pembuatan keputusan, hingga implementasi kebijakan, bahkan memiliki hak veto atas kebijakan yang tidak sejalan dengan aspirasi mereka,

Penelitian oleh Kanyane et al. (2022) menyoroti bahwa hubungan antara akuntabilitas sosial dan partisipasi warga memang diakui penting, tetapi nuansa pelaksanaannya sering kali diabaikan. Dalam praktiknya, partisipasi yang terjadi lebih sering berada pada tingkatan tokenisme, seperti yang ditemukan dalam studi kasus Kotamadya Lokal Ngqushwa. Empat mekanisme partisipasi yang digunakan—Rencana Pembangunan Terpadu (IDP), Komite Lingkungan, Imbizos, dan penganggaran partisipatif—menunjukkan bahwa keterlibatan warga masih terbatas pada pemberian informasi dan konsultasi, tanpa pengaruh nyata terhadap kebijakan atau prioritas pembangunan (Camargo & Stahl, 2016; Shava & Hofisi, 2021).

Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan untuk ekonomi biru berkelanjutan, pemahaman tentang teori partisipasi menjadi krusial. Pengelolaan sumber daya kelautan yang melibatkan masyarakat pesisir secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus mengurangi potensi konflik. Oleh karena itu, penerapan kerangka Tangga Partisipasi tidak hanya relevan untuk konteks kota, tetapi juga memiliki signifikansi tinggi dalam kerangka pembangunan ekonomi biru yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematis dengan merujuk pada kerangka PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis*). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan proses pengumpulan dan seleksi literatur dilakukan secara transparan, terstruktur, dan dapat direplikasi.

1. Strategi Pencarian Literatur

Pencarian literatur dilakukan pada beberapa basis data utama, yaitu Scopus, Web of Science, ProQuest, dan Google Scholar. Selain itu, laporan kebijakan dari lembaga internasional (UNDP, FAO, UNEP) serta dokumen kebijakan nasional turut dijadikan sumber pelengkap. Pencarian difokuskan pada publikasi antara 2009–2024 dengan kata kunci seperti: *dialogic accounting*, *sustainable coastal resource management*, *blue economy*, *environmental justice*, *community-based resource management*, dan *public participation in decision-making*.

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi: artikel jurnal peer-reviewed, buku akademik, prosiding ilmiah, dan laporan resmi lembaga internasional; relevan dengan tema akuntansi dialogis, pengelolaan sumber daya pesisir, dan ekonomi biru berkelanjutan; berbahasa Inggris atau Indonesia. Kriteria eksklusi: artikel populer, opini, editorial, laporan tanpa telaah sejawat, dan publikasi yang tidak relevan dengan konteks penelitian.

3. Proses Seleksi Literatur (mengacu PRISMA)

Tahapan seleksi dilakukan secara bertahap:

- Identifikasi: ditemukan sebanyak 356 publikasi awal dari seluruh basis data.
- Penyaringan duplikasi: setelah menghapus artikel duplikat, tersisa 298 publikasi unik.
- Penyaringan judul dan abstrak: dari 298 publikasi, sebanyak 187 artikel dieliminasi karena tidak relevan dengan fokus penelitian. Tersisa 111 artikel untuk ditelaah lebih lanjut.
- Penilaian kelayakan (*full-text review*): setelah kajian penuh, 71 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi (misalnya hanya membahas aspek teknis perikanan tanpa kaitan dengan akuntansi dialogis atau keadilan lingkungan).
- Inklusi akhir: total 50 publikasi (artikel jurnal, buku akademik, dan laporan resmi) dipilih sebagai sumber utama analisis.

4. Analisis Data

Publikasi terpilih kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis tematik induktif. Proses ini menghasilkan beberapa tema utama:

- keterkaitan akuntansi dialogis dengan transparansi dan akuntabilitas kebijakan,
- kontribusinya terhadap prinsip keadilan sosial dan lingkungan,
- serta perannya dalam memperkuat partisipasi masyarakat.
- untuk menganalisis aspek partisipasi masyarakat, penelitian ini menggunakan kerangka Tangga Partisipasi Arnstein sebagai alat bantu kategorisasi.

Dengan mengikuti tahapan PRISMA, penelitian ini memastikan proses seleksi literatur berlangsung transparan, terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakadilan Lingkungan dalam Eksploitasi Sumber Daya Pesisir

Pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia masih diwarnai oleh ketidakadilan lingkungan yang sistematis, di mana kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan nelayan kecil sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh berbagai aktivitas industri (Bullard, 2005; Mohai et al., 2009). Salah satu bentuk ketidakadilan tersebut adalah praktik pengalihan beban polusi dan limbah oleh aktor-aktor dominan kepada komunitas lokal. Aktivitas industri pengolahan ikan, misalnya, menghasilkan limbah yang mencemari ekosistem pesisir dan berdampak langsung terhadap

kesehatan masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya laut untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kerugian yang timbul dari pencemaran tersebut merupakan bentuk *externalized costs*, yakni biaya yang tidak ditanggung oleh pelaku industri, melainkan dibebankan kepada masyarakat lokal (Adekola et al., 2017).

Dalam kerangka akuntansi keberlanjutan, *environmental cost accounting* dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menghitung biaya sosial dan ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Sayangnya, praktik pelaporan keberlanjutan yang ada masih jarang memasukkan dampak riil terhadap kelompok rentan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini memperbesar ketimpangan informasi dan mengaburkan tanggung jawab sosial yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha.

Dampak lingkungan tidak berhenti pada pencemaran limbah saja. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya pesisir juga mempercepat degradasi ekosistem penting, seperti hutan bakau dan terumbu karang. Salah satu contoh nyata adalah konversi hutan bakau menjadi tambak udang di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Praktik ini merusak fungsi ekosistem yang krusial, seperti perlindungan alami terhadap bencana, penyediaan tempat berkembang biak bagi berbagai spesies laut, serta penyangga ketahanan ekologi dan ekonomi komunitas pesisir (Blythe et al., 2020). Dalam jangka panjang, degradasi ekosistem ini akan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan badai, sekaligus menurunkan kapasitas ekosistem dalam mendukung kehidupan masyarakat lokal.

Selain itu, praktik *overfishing* yang marak di perairan Indonesia memperburuk ketahanan ekosistem laut. Penangkapan ikan secara berlebihan mengganggu keseimbangan rantai makanan dan menurunkan kapasitas regenerasi sumber daya ikan, sehingga mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan skala kecil (Lamb et al., 2019). Akuntansi dialogis dapat berperan penting untuk mendokumentasikan kerugian ekonomi yang timbul dari hilangnya jasa ekosistem akibat eksploitasi berlebihan ini. Dengan mendokumentasikan nilai ekonomi dari jasa ekosistem yang hilang, akuntansi keberlanjutan dapat membantu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dampak sosial-ekologis yang terjadi.

Kerangka pelaporan keberlanjutan yang lebih inklusif sangat dibutuhkan agar proses pengambilan keputusan tidak lagi hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem (Bavinck et al., 2017). Dengan demikian, pengelolaan sumber daya pesisir tidak hanya berbicara soal produktivitas ekonomi, tetapi juga mengenai keadilan ekologis dan sosial bagi komunitas yang terdampak.

Marginalisasi Masyarakat Lokal dalam Tata Kelola Sumber Daya Laut

Selain ketidakadilan lingkungan, persoalan mendasar lainnya dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia adalah marginalisasi masyarakat lokal dalam proses tata kelola. Nelayan skala kecil dan masyarakat adat sering kali tersingkirkan oleh kebijakan pemerintah dan dominasi korporasi besar. Kebijakan zonasi perikanan, privatisasi hak akses laut, serta pemberian kuota tangkap kepada perusahaan-perusahaan besar telah mempersempit ruang gerak masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya laut yang menjadi penopang utama kehidupan mereka (Adjei & Overå, 2019).

Di banyak wilayah pesisir Indonesia, proyek-proyek pembangunan berbasis ekonomi biru, seperti tambak komersial dan pengembangan energi terbarukan laut, dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat lokal. Akibatnya, proyek-proyek ini sering kali mengorbankan hak-hak masyarakat atas akses terhadap sumber daya pesisir yang sebelumnya menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi mereka

(Blythe et al., 2015). Kehilangan akses ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi langsung, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan identitas budaya komunitas lokal yang sangat bergantung pada laut.

Dalam konteks akuntansi dialogis, kerangka pelaporan seperti *Integrated Reporting* dapat menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan dampak sosial dan ekologis dari kehilangan akses ini (Bennett et al., 2018). Dengan pendekatan partisipatif berbasis *stakeholder engagement*, akuntansi dialogis memungkinkan masyarakat lokal menyuarakan dampaknya secara langsung dalam laporan keberlanjutan perusahaan atau institusi terkait. Hal ini juga mendorong tanggung jawab sosial perusahaan agar lebih akuntabel terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya.

Pentingnya pengakuan terhadap kontribusi masyarakat lokal semakin mendesak mengingat mereka memiliki peran signifikan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Melalui praktik penangkapan ikan tradisional yang bersifat lestari, komunitas lokal berkontribusi pada stabilitas sosial dan ketahanan pangan masyarakat pesisir (Pomeroy et al., 2015). Namun, kontribusi ini sering kali diabaikan dalam kebijakan perikanan nasional yang lebih berpihak kepada kepentingan komersial jangka pendek.

Dengan akuntansi dialogis, nilai-nilai informal seperti jasa ekosistem, kontribusi terhadap ketahanan pangan, dan peran sosial-budaya masyarakat lokal dapat diinternalisasi ke dalam proses pelaporan. Ini menjadi langkah awal untuk membangun kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir yang lebih inklusif dan adil.

Ketimpangan Distribusi Manfaat Ekonomi dan Pengabaian Dimensi Sosial-Budaya

Masalah lain yang menonjol dalam pengelolaan sumber daya laut di Indonesia adalah ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dari aktivitas eksploitasi sumber daya pesisir. Dalam praktiknya, sebagian besar keuntungan dari sektor perikanan dan sumber daya laut dinikmati oleh aktor-aktor besar, baik korporasi maupun elite politik, sedangkan masyarakat pesisir yang terdampak hanya memperoleh manfaat yang sangat terbatas (McCauley et al., 2018). Pola ini mempertegas ketimpangan struktural dalam pembangunan ekonomi biru, yang justru berpotensi memperdalam jurang kemiskinan di kalangan masyarakat lokal.

Akuntansi keberlanjutan memiliki potensi besar untuk mendokumentasikan ketimpangan ini dengan cara mengungkapkan kontribusi ekonomi informal dari komunitas lokal. Aktivitas seperti perikanan tradisional, pengolahan hasil laut secara rumah tangga, serta jasa ekosistem yang disediakan oleh masyarakat pesisir sering kali tidak tercermin dalam statistik ekonomi formal. Dengan memasukkan aspek-aspek ini ke dalam laporan keberlanjutan, akuntansi dialogis dapat membantu memperjelas kontribusi riil masyarakat lokal terhadap perekonomian wilayah pesisir (Toufique & Gregory, 2008).

Selain ketimpangan ekonomi, pembangunan berbasis ekonomi biru juga kerap mengabaikan dimensi sosial dan budaya masyarakat pesisir. Pembangunan yang menitikberatkan pada akumulasi kapital sering kali berdampak negatif terhadap struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Salah satu contohnya dapat dilihat pada kebijakan konservasi laut di Tanzania, di mana proyek konservasi justru mengakibatkan pengusuran masyarakat lokal dan memicu konflik sosial (Benjaminsen & Bryceson, 2012). Pengalaman serupa juga mulai terjadi di berbagai wilayah Indonesia ketika proyek pembangunan dilakukan tanpa memperhitungkan nilai-nilai sosial-budaya yang melekat pada masyarakat pesisir.

Dalam konteks ini, akuntansi dialogis memainkan peran penting untuk mendokumentasikan dampak sosial dan budaya yang sering kali tersembunyi di balik

narasi pembangunan ekonomi (Poe et al., 2014). Proses pelaporan berbasis data yang komprehensif memungkinkan pengambil kebijakan untuk melihat dampak-dampak yang selama ini tidak terkuak, sekaligus menjadi dasar untuk membangun kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kondisi sosial-ekologis lokal (Barclay, 2010). Dengan demikian, pendekatan akuntansi dialogis bukan hanya relevan sebagai alat pencatatan dampak ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme advokasi yang dapat memperkuat posisi tawar masyarakat pesisir dalam menghadapi berbagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang selama ini mereka alami.

Akuntansi dialogis menawarkan pendekatan yang mampu menjembatani kesenjangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan wilayah pesisir, pendekatan ini bukan sekadar metode pelaporan keuangan, tetapi sebuah kerangka kerja partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan. Dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berdialog secara setara dengan pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, akuntansi dialogis mendorong perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Hermes, 2017).

Lebih dari sekadar mencatat dampak keuangan, akuntansi dialogis memastikan bahwa aspek sosial, budaya, dan lingkungan mendapat perhatian yang seimbang. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai sarana akuntabilitas sosial, di mana masyarakat berhak untuk menilai, mengkritisi, dan mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam kerangka pembangunan wilayah pesisir, akuntansi dialogis dapat meminimalisir konflik akibat perebutan sumber daya, karena semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan sejak awal.

Salah satu kontribusi penting dari pendekatan akuntansi dialogis adalah pengakuan terhadap pengetahuan lokal sebagai sumber daya yang setara dengan ilmu pengetahuan formal. Pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pada pengetahuan lokal berpotensi meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam, karena masyarakat adat atau masyarakat pesisir sering kali memiliki tradisi pengelolaan sumber daya yang lebih ramah lingkungan dan berbasis keseimbangan ekosistem (Kristian, 2021; Bidayani & Kurniawan, 2020). Model *co-management* atau pengelolaan bersama merupakan contoh konkret dari integrasi antara pendekatan formal dan pengetahuan lokal. Dalam model ini, masyarakat dapat memasukkan norma, ritual, dan sistem nilai tradisional mereka ke dalam mekanisme pengelolaan yang diakui secara hukum. Seperti yang diungkapkan (Monteiro & Pello, 2021), pengakuan atas praktik adat dapat memperkuat efektivitas pengelolaan lingkungan sekaligus melestarikan identitas budaya masyarakat pesisir. Integrasi kearifan lokal ini bukan hanya memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Oleh karena itu, akuntansi dialogis bukan hanya soal transparansi informasi, tetapi juga sarana untuk memastikan bahwa solusi yang ditawarkan relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat.

Akuntansi Dialogis sebagai Pilar Menuju Ekonomi Biru yang Adil dan Berkelanjutan

Di tengah arus globalisasi dan desakan pembangunan ekonomi, konsep ekonomi biru sering kali dipahami secara sempit, hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan finansial. Padahal, esensi sejati dari ekonomi biru seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial, budaya, dan ekologis secara seimbang (Fudge et al., 2023; Srinivasan et al., 2022). Dalam konteks inilah akuntansi dialogis menjadi relevan. Pendekatan ini memberikan kerangka untuk menggabungkan berbagai dimensi tersebut dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pengambilan keputusan pembangunan.

Akuntansi dialogis menempatkan pelibatan aktif masyarakat sebagai fondasi utama. Dengan memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan pembangunan tidak lagi bersifat *top-down*, melainkan lahir dari dialog setara antara berbagai aktor yang memiliki hak dan kepentingan atas sumber daya laut. Praktik ini sejalan dengan kebutuhan global akan sistem tata kelola yang adil, khususnya bagi negara-negara berkembang yang selama ini sering kehilangan suara dalam negosiasi kebijakan kelautan internasional (Sparks & Sliva, 2019). Oleh karena itu, penerapan akuntansi dialogis bukan hanya relevan bagi Indonesia secara lokal, tetapi juga memiliki arti penting dalam konteks tata kelola sumber daya laut secara global.

Namun, optimisme terhadap potensi ekonomi biru sering kali bertabrakan dengan kenyataan di lapangan. Ketimpangan akses terhadap sumber daya laut masih menjadi masalah utama, terutama di kalangan masyarakat pesisir. Fenomena *ocean grabbing*—di mana kekuatan modal besar mengambil alih akses terhadap sumber daya laut—menjadi ancaman nyata bagi hak-hak tradisional masyarakat lokal. Ironisnya, konsep ekonomi biru yang seharusnya berorientasi pada keberlanjutan justru sering dimanfaatkan oleh aktor bermodal besar untuk memperluas kekuasaan ekonominya (Brent et al., 2018). Dalam kondisi seperti ini, keberadaan sistem akuntansi yang transparan dan partisipatif menjadi semakin mendesak agar praktik-praktik ketidakadilan tersebut dapat dicegah atau diminimalkan.

Akuntansi keberlanjutan berperan penting sebagai jembatan untuk mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam proses perumusan kebijakan. Penerapan nyata dari pendekatan ini dapat dilihat dalam studi tentang privatisasi perikanan di Kanada dan Islandia. Dalam kedua kasus tersebut, laporan akuntansi keberlanjutan berfungsi untuk mengungkap siapa yang mendapatkan keuntungan dan siapa yang dirugikan oleh kebijakan yang diambil (Carothers & Chambers, 2012). Pendekatan akuntansi keberlanjutan ini pada akhirnya membuka ruang bagi pertanggungjawaban sosial yang lebih kuat, sehingga proses pembangunan tidak berhenti hanya pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mendukung pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal yang selama ini sering terpinggirkan.

Mengukur Dampak Sosial dan Lingkungan melalui *Social Return on Investment (SROI)*

Salah satu pendekatan yang relevan dalam memastikan pembangunan ekonomi biru berjalan secara adil dan berkelanjutan adalah penerapan kerangka *Social Return on Investment (SROI)*. Kerangka ini dirancang untuk mengukur secara transparan dampak kebijakan pembangunan, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Dengan SROI, proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif karena mampu memasukkan dimensi-dimensi yang sering kali luput dalam laporan keuangan konvensional (Aptasari et al., 2024). Di Indonesia sendiri, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk diterapkan, terutama dalam pengelolaan perikanan skala kecil agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat pesisir.

Namun demikian, penerapan pendekatan seperti SROI tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perubahan dalam pola tata kelola. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah masih kuatnya pola pengambilan keputusan yang bersifat *top-down*. Dalam pengelolaan sumber daya laut, keputusan strategis sering kali lebih berpihak pada kepentingan investor besar, sedangkan suara komunitas lokal cenderung terpinggirkan (Pinkerton, 2017). Dalam situasi seperti inilah akuntansi dialogis menjadi krusial. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun ruang dialog yang setara di antara semua pemangku kepentingan, sehingga setiap pihak memiliki hak suara yang seimbang dalam menentukan arah kebijakan. Akuntansi dialogis tidak hanya meningkatkan

transparansi tata kelola, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk meminimalkan potensi konflik antara kelompok berkepentingan yang berbeda.

Lebih jauh, agar pengelolaan sumber daya perikanan dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan, integrasi akuntansi dialogis ke dalam strategi bisnis maupun kebijakan pemerintah menjadi langkah yang tidak dapat ditawar. Sistem akuntansi yang dibangun seharusnya tidak berhenti pada pengukuran kinerja finansial semata, melainkan juga harus mencakup indikator sosial dan lingkungan secara menyeluruh (Silvestre & Fonseca, 2020). Penyusunan indikator kinerja yang komprehensif ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak membawa dampak negatif bagi ekosistem laut maupun kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan cara ini, tata kelola sumber daya laut Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih berkeadilan dan adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Selain aspek teknis, keberhasilan implementasi akuntansi dialogis juga sangat ditentukan oleh nilai dan budaya organisasi itu sendiri. Nilai-nilai keberlanjutan harus menjadi bagian yang melekat dalam identitas organisasi agar proses dialog yang tercipta bersifat konstruktif dan berorientasi pada kepentingan bersama (Manetti et al., 2021). Budaya dialogis yang terbangun dengan baik di dalam organisasi akan memperkuat sinergi di antara berbagai aktor internal, seperti nelayan, pengelola koperasi, dan manajemen perikanan. Integrasi nilai-nilai keberlanjutan ini menjadi kunci utama agar proses dialog tidak berhenti sebagai formalitas administratif semata, melainkan mampu mendorong organisasi untuk secara nyata bergerak menuju pencapaian tujuan keberlanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi akuntansi dialogis sebagai pendekatan yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dalam konteks pembangunan ekonomi biru di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Bagaimana akuntansi dialogis dapat berperan dalam memperkuat partisipasi masyarakat pesisir serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya kelautan?

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk eksploitasi berlebihan, ketimpangan sosial, dan kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif terhadap masyarakat pesisir. Dalam menghadapi persoalan tersebut, akuntansi dialogis diposisikan bukan hanya sebagai pendekatan teoretis, melainkan sebagai solusi praktis untuk memperkuat keterlibatan masyarakat, memperluas akses terhadap informasi, serta memastikan bahwa suara masyarakat pesisir turut mewarnai kebijakan pembangunan wilayah pesisir.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menawarkan kerangka akuntansi dialogis sebagai solusi nyata dalam tata kelola ekonomi biru yang berkeadilan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif. Kebaruan dari kajian ini terletak pada eksplorasi bagaimana akuntansi dialogis dapat dijadikan alat mediasi yang efektif dalam menyeimbangkan kepentingan negara, sektor swasta, dan masyarakat lokal yang selama ini cenderung termarginalisasi.

Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan pentingnya penerapan akuntansi dialogis dalam proses formulasi kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan, dengan dukungan teknologi informasi untuk memperluas akses data dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan penerapan akuntansi dialogis, tata kelola sumber daya pesisir dapat

bergerak menuju model yang lebih inklusif dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis studi literatur sehingga belum dapat memberikan gambaran empiris terkait implementasi akuntansi dialogis di lapangan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan dilakukan studi empiris yang melibatkan komunitas pesisir di berbagai wilayah Indonesia agar model akuntansi dialogis dapat dikembangkan sesuai konteks sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan dapat lebih efektif dalam mendorong keberlanjutan dan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya mengisi kesenjangan kajian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi upaya memperbaiki tata kelola sumber daya kelautan Indonesia ke arah yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adekola, J., Fischbacher-Smith, M., Fischbacher-Smith, D., & Adekola, O. (2017). Health risks from environmental degradation in the Niger Delta, Nigeria. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 35(2), 334–354. <https://doi.org/10.1177/0263774X16661720>
- Adjei, M., & Overå, R. (2019). Opposing discourses on the offshore coexistence of the petroleum industry and small-scale fisheries in Ghana. *The Extractive Industries and Society*, 6(1), 190–197. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.09.006>
- Aptasari, F. W., Maharani Putri, B. K., Mujahidi, K., & Hastuti, E. W. (2024). TANTANGAN PENERAPAN SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI) DI INDONESIA STUDI KASUS PADA WILAYAH PESISIR. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(2), 53–76. <https://doi.org/10.24929/feb.v14i2.3696>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kontribusi perikanan terhadap produk domestik bruto atas dasar harga berlaku (2015–2019)*. <https://www.bps.go.id/Id/Statistics-Table/3/T0UxS09GQIBTbk5QWTBndIVWUmxSMjV3Y3l0VWR6MDkzMw==/Distribusi-Persentase-Produk-Domestik-Bruto-Atas-Dasar-Harga-Berlaku-Menurut-Lapangan-Usaha--2022.Html?Year=2019>
- Barclay, K. (2010). Impacts of tuna industries on coastal communities in Pacific Island countries. *Marine Policy*, 34(3), 406–413. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.09.003>
- Bavinck, M., Berkes, F., Charles, A., Dias, A. C. E., Doubleday, N., Nayak, P., & Sowman, M. (2017). The impact of coastal grabbing on community conservation – a global reconnaissance. *Maritime Studies*, 16(1), 8. <https://doi.org/10.1186/s40152-017-0062-8>
- Bebbington, J., Brown, J., & Frame, B. (2007). Accounting technologies and sustainability assessment models. *Ecological Economics*, 61(2–3), 224–236. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.10.021>
- Benjaminsen, T. A., & Bryceson, I. (2012). Conservation, green/blue grabbing and accumulation by dispossession in Tanzania. *Journal of Peasant Studies*, 39(2), 335–355. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.667405>
- Bennett, N. J., Kaplan-Hallam, M., Augustine, G., Ban, N., Belhabib, D., Brueckner-Irwin, I., Charles, A., Couture, J., Eger, S., Fanning, L., Foley, P., Goodfellow, A. M., Greba, L., Gregr, E., Hall, D., Harper, S., Maloney, B., McIsaac, J., Ou, W., ... Bailey, M. (2018).

- Coastal and Indigenous community access to marine resources and the ocean: A policy imperative for Canada. *Marine Policy*, 87, 186–193. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.023>
- Bidayani, E., & Kurniawan, K. (2020). Conflict Resolution in Coastal Resource Utilization among Fishermen and Unconventional Tin Miners. *Society*, 8(1), 13–22. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.139>
- Blythe, J., Armitage, D., Alonso, G., Campbell, D., Esteves Dias, A. C., Epstein, G., Marschke, M., & Nayak, P. (2020). Frontiers in coastal well-being and ecosystem services research: A systematic review. *Ocean & Coastal Management*, 185, 105028. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.105028>
- Blythe, J., Flaherty, M., & Murray, G. (2015). Vulnerability of coastal livelihoods to shrimp farming: Insights from Mozambique. *AMBIO*, 44(4), 275–284. <https://doi.org/10.1007/s13280-014-0574-z>
- Botchwey, N. D., Johnson, N., O'Connell, L. K., & Kim, A. J. (2019). Including Youth in the Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 85(3), 255–270. <https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1616319>
- Brent, Zoe. W., Barbesgaard, M., & Pedersen, C. (2018). The Blue Fix: Unmasking the politics behind the promise of blue growth. *Transnational Institute*, 1–23.
- Brinkerhoff, D. W., & Wetterberg, A. (2016). Gauging the Effects of Social Accountability on Services, Governance, and Citizen Empowerment. *Public Administration Review*, 76(2), 274–286. <https://doi.org/10.1111/puar.12399>
- Brown, J., & Dillard, J. (2014). Integrated reporting: On the need for broadening out and opening up. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(7), 1120–1156. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2013-1313>
- Bullard, R. D. (2005). *The Quest for Environmental Justice: Human Rights and the Politics of Pollution*. Sierra Club Books.
- Camargo, C. B., & Stahl, F. (2016). *Social accountability: A practitioner's handbook*. Basel Institute Governance.
- Carothers, C., & Chambers, C. (2012). Fisheries Privatization and the Remaking of Fishery Systems. *Environment and Society*, 3(1). <https://doi.org/10.3167/ares.2012.030104>
- Decker Sparks, J. L., & Sliva, S. M. (2019). An intersectionality-based analysis of high seas policy making stagnation and equity in United Nations negotiations. *Journal of Community Practice*, 27(3–4), 260–278. <https://doi.org/10.1080/10705422.2019.1647325>
- Dmytriiev, S. D., Freeman, R. E., & Hörisch, J. (2021). The Relationship between Stakeholder Theory and Corporate Social Responsibility: Differences, Similarities, and Implications for Social Issues in Management. *Journal of Management Studies*, 58(6), 1441–1470. <https://doi.org/10.1111/joms.12684>
- Falah, M. H., & Aptasari, F. W. (2023). Tantangan Koperasi Nelayan sebagai Penyeimbang Rezim Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Indonesia. In *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan*. Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.908.c765>
- Fudge, M., Ogier, E., & Alexander, K. A. (2023). Marine and coastal places: Wellbeing in a blue economy. *Environmental Science & Policy*, 144, 64–73. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.03.002>

- Gray, R. (1992). Accounting and environmentalism: An exploration of the challenge of gently accounting for accountability, transparency and sustainability. *Accounting, Organizations and Society*, 17(5), 399–425. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(92\)90038-T](https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90038-T)
- Hermes. (2017). *Model pengelolaan pembangunan wilayah berbasis penanggulangan kemiskinan di Kota Bengkulu [Disertasi]*. Institut Pertanian Bogor.
- Hörisch, J., Freeman, R. E., & Schaltegger, S. (2014). Applying Stakeholder Theory in Sustainability Management. *Organization & Environment*, 27(4), 328–346. <https://doi.org/10.1177/1086026614535786>
- Kanyane, M., Mutema, E. P., & Zikhali, T. (2022). Social accountability in local government: Lessons from Vuwani (South Africa) and Gweru (Zimbabwe). *Journal of Public Affairs*, 22(3). <https://doi.org/10.1002/pa.2581>
- Khodary, Y. (2022). *An Analysis of Social Accountability and Local Governance Interventions in Egypt During the Transition* (pp. 177–198). https://doi.org/10.1007/978-3-030-82257-6_8
- Kristian, I. (2021). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat. *Jurnal RASI*, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.52496/rasi.v1i1.29>
- Lamb, V., Marschke, M., & Rigg, J. (2019). Trading Sand, Undermining Lives: Omitted Livelihoods in the Global Trade in Sand. *Annals of the American Association of Geographers*, 109(5), 1511–1528. <https://doi.org/10.1080/24694452.2018.1541401>
- Lüdeke-Freund, F., Freudenreich, B., Schaltegger, S., Saviuc, I., & Stock, M. (2017). Sustainability-Oriented Business Model Assessment – A Conceptual Foundation. In *Analytics, Innovation, and Excellence-Driven Enterprise Sustainability* (pp. 169–206). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/978-1-137-37879-8_7
- Manetti, G., Bellucci, M., & Oliva, S. (2021). Unpacking dialogic accounting: a systematic literature review and research agenda. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(9), 250–283. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2020-4736>
- Masiya, T., Davids, Y. D., & Mazenda, A. (2019). Effective public participation in municipal service delivery: The case of Nyanga Township. *Administratio Publica*, 27(3), 27–47.
- McCauley, D. J., Jablonicky, C., Allison, E. H., Golden, C. D., Joyce, F. H., Mayorga, J., & Kroodsma, D. (2018). Wealthy Countries Dominate Industrial Fishing. *Science Advances*, 4(8). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aau2161>
- Mohai, P., Pellow, D., & Roberts, J. T. (2009). Environmental Justice. *Annual Review of Environment and Resources*, 34(1), 405–430. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-082508-094348>
- Monteiro, J., & Pello, J. (2021). PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS HUKUM ADAT MELALUI MODEL CO-MANAGEMENT. *Arena Hukum*, 14(1), 67–83. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.4>
- Nomdo, A., Masiya, T., & Khambule, I. (2019). A Review of Spaces of Local Participation to Promote Service Delivery in South Africa. *JOURNAL OF HUMAN ECOLOGY*, 65(1–3). <https://doi.org/10.31901/24566608.2019/65.1-3.3134>
- Pebrianto, F. (2020, September 8). Kontribusi sektor kelautan dan perikanan ke PDB baru 3,7 persen. *Tempo.Co*.

- Pinkerton, E. (2017). Hegemony and resistance: Disturbing patterns and hopeful signs in the impact of neoliberal policies on small-scale fisheries around the world. *Marine Policy*, 80, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.11.012>
- Poe, M. R., Norman, K. C., & Levin, P. S. (2014). Cultural Dimensions of Socioecological Systems: Key Connections and Guiding Principles for Conservation in Coastal Environments. *Conservation Letters*, 7(3), 166–175. <https://doi.org/10.1111/conl.12068>
- Pomeroy, C., Hall-Arber, M., & Conway, F. (2015). Power and perspective: Fisheries and the ocean commons beset by demands of development. *Marine Policy*, 61, 339–346. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.11.016>
- Pryanka, A. (2018, November 5). Guru besar IPB sampaikan penyebab nelayan indonesia miskin. *Ekonomi Republika*. <https://Ekonomi.Republika.Co.Id/Berita/Pi7qdl383/Guru-Besar-Ipb-Sampaikan-Penyebab-Nelayan-Indonesia-Miskin>.
- Schaaf, M., Topp, S. M., & Ngulube, M. (2017). From favours to entitlements: community voice and action and health service quality in Zambia. *Health Policy and Planning*, 32(6), 847–859. <https://doi.org/10.1093/heapol/czx024>
- Shava, E., & Hofisi, C. (2021). Enhancing Basic Service Delivery through Social Accountability Mechanisms. *Hong Kong Journal of Social Sciences*, 58(1), 311–323.
- Silvestre, W. J., & Fonseca, A. (2020). Integrative Sustainable Intelligence: A holistic model to integrate corporate sustainability strategies. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(4), 1578–1590. <https://doi.org/10.1002/csr.1906>
- Srinivasan, M., Kaullysing, D., Bhagooli, R., & Pratt, S. (2022). Marine Tourism and the Blue Economy: Perspectives from the Mascarene and Pacific Islands. In *Blue Economy* (pp. 153–189). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-5065-0_6
- Toufique, K. A., & Gregory, R. (2008). Common waters and private lands: Distributional impacts of floodplain aquaculture in Bangladesh. *Food Policy*, 33(6), 587–594. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.04.001>
- Vuković, D., & Babović, M. (2018). The Trap of Neo-patrimonialism: Social Accountability and Good Governance in Cambodia. *Asian Studies Review*, 42(1), 144–160. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1414773>
- Yilmaz, S., Beris, Y., & Serrano-Berthet, R. (2008). *Local government discretion and accountability: A local governance framework* (113; Social Development).